

Katalog: 3205011.32

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT Maret 2019



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT***

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT Maret 2019



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2019

ISSN : 2654-6841
Katalog : 3205011.32
No. Publikasi : 32520.1907

Ukuran Buku : 18,2 x 24,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 32 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2019

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M. Econ

Penanggung Jawab Teknis : Ir. R. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penulis dan Pengolah Data : Esti Suciningtyas Pratiwi, S.ST

Penyunting / Editor : Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat.

Judiharto Trisnadi, S.ST, MM

Dewi Mulyahati, S.Si, ME

<https://jabar.mp3.gs.icu>

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak tahun 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu rilis dilaksanakan setiap bulan Juli untuk keadaan maret dan bulan Januari untuk keadaan september. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Barat menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BRS kemiskinan keadaan Maret 2019, disajikan dalam bentuk publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2019".

Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2019
Kepala BPS
Provinsi Jawa Barat,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019	3
III. Perubahan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019	7
IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019	12
V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019.....	14
VI. Penutup	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19
CATATAN TEKNIS	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat menurut Daerah, Maret 2018 – Maret 2019	4
Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan, Maret 2019	10

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Maret 2019.....	7
Gambar 2. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Maret 2018 - Maret 2019.....	8
Gambar 3. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan/Non Makanan Provinsi Jawa Barat, Maret 2019.....	9
Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat, Maret 2018 – Maret 2019.....	13
Gambar 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat, Maret 2018 – Maret 2019.....	14
Gambar 6. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2018 - Maret 2019.....	15
Gambar 7. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, Maret 2019 (Persen).....	17

I. Pendahuluan

Salah satu poin kesepakatan dari seluruh bangsa di dunia yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan sampai pada pertengahan tahun 2015. Di berbagai negara, upaya untuk menekan angka kemiskinan juga masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Oleh karena itu pada bulan September 2015, para pemimpin dunia menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan kemiskinan tetap merupakan salah satu poin penting yang ada dalam SDGs.

Kemiskinan adalah kondisi yang harus dikurangi pada tahun 2030 seperti yang tertuang dalam SDG's. Untuk mengukur kemiskinan diperlukan suatu konsep yang jelas. BPS menggunakan konsep kemiskinan berdasarkan dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,

minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama dalam menghitung Garis Kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis Kemiskinan yang dihasilkan hanya menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk secara makro dikarenakan sumber data yang dipakai hanya berdasarkan survei. Kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana keberadaan penduduk miskin tersebut. Namun demikian, kemiskinan makro dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kemiskinan di suatu daerah. Data berkalanya digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar waktu menurut wilayah sehingga pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai dasar kebijakan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Selama ini, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah gencar melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang cukup besar pun digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, berbagai program penanggulangan kemiskinan akan tidak efektif saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kemiskinan, misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kenaikan tarif dasar listrik. Kondisi seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan ibukota negara Republik Indonesia.

II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu bulan Maret 2018–Maret 2019 di Jawa Barat menunjukkan tren menurun. Pada keadaan Maret 2018, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 7,45 persen (3,62 juta jiwa). Dan pada keadaan September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,20 poin persen menjadi 7,25 persen (3,54 juta jiwa).

Pada Maret 2019, persentase penduduk miskin di Jawa Barat kembali mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persen dibandingkan keadaan September 2018 menjadi 6,91 % (3,4 juta jiwa). Jika dilihat selama kurun waktu Maret 2018-Maret 2019, persentase penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,54 poin. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti pemerintah telah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama periode Maret 2018 – Maret 2019.

Secara absolut dalam kurun waktu setahun terakhir selama periode Maret 2018 – Maret 2019, penduduk miskin Jawa Barat terjadi penurunan sekitar 217 ribu jiwa yaitu dari 3,62 juta jiwa menjadi 3,40 juta jiwa. Penurunan ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin berkurang 157 ribu jiwa (dari 1,29 juta jiwa menjadi 1,13 juta jiwa). Hal yang sama terjadi juga di perkotaan dimana secara absolut mengalami penurunan sebanyak 59 ribu jiwa (2,33 juta jiwa menjadi 2,27 juta jiwa).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat menurut Daerah, Maret 2018 – Maret 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2018	2,33	6,47
September 2018	2,34	6,33
Maret 2019	2,27	6,03
Perdesaan		
Maret 2018	1,29	10,25
September 2018	1,20	10,07
Maret 2019	1,13	9,79
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2018	3,62	7,45
September 2018	3,54	7,25
Maret 2019	3,40	6,91

Sumber : Data Susenas 2018-2019

Secara relatif, selama periode Maret 2018–Maret 2019, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 0,46 poin persen (10,25 persen menjadi 9,79 persen). Begitu juga di daerah perkotaan turun sebesar 0,44 poin persen (dari 6,47 persen menjadi 6,03 persen). Untuk periode September 2018 – Maret 2019, penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan 0,28 poin persen (dari 10,07 persen menjadi 9,79 persen) dan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,30 poin persen yaitu dari 6,33 persen menjadi 6,03 persen.

Penurunan persentase kemiskinan pada kurun waktu September 2018 – Maret 2019 (0,34 poin persen) patut diduga bahwa program pemerintah di bidang ekonomi cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini digambarkan dari data makro ekonomi yang mendukung penurunan persentase penduduk miskin, diantaranya :

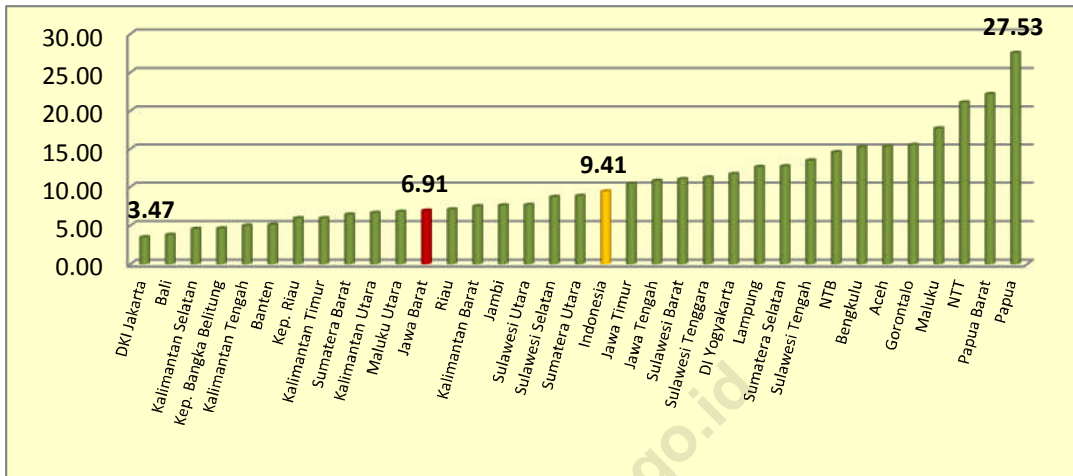
1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2019 mencapai 5,43% (y o y) tercatat sebagai pertumbuhan terbesar dalam lima tahun terakhir, sejak 2014.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kondisi Maret 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,30 poin dibandingkan kondisi September 2018 yaitu dari 109,61 menjadi 109,91.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat mengalami penurunan dari 8,17 persen pada Agustus 2018 menjadi 7,73 persen pada Februari 2019.
4. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2018 – Maret 2019 tumbuh 0,30 persen.
5. Menurut desil pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 sampai dengan Desil 4 selama periode September 2018–Maret 2019 mengalami peningkatan berturut–turut adalah 3,67 persen; 1,67 persen; 1,93 persen; dan 1,10 persen.
6. Selama periode September 2018 – Maret 2019 sudah banyak program-program pemerintah yang digulirkan seperti bantuan-bantuan sosial (PKH, BPNT, PIP, BSM, dll) serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kredit usaha mikro yang telah dikururkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro.

Secara umum, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar dari pada perkotaan. Salah satu penyebabnya dikarenakan akses, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah perdesaan yang relatif belum memadai yang menghambat penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan umum baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Selain itu, bisa dimungkinkan karena kualitas sumber daya manusia di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Dari gambaran kondisi ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu bagaimana mengurangi "gap" antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Pemerintah harus bisa mengendalikan stabilitas harga, khususnya harga kebutuhan pokok sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Posisi relatif angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya pada Maret 2019 ada pada posisi ke-12 persentase kemiskinan terendah. Persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan angka 3,47 persen dan yang tertinggi yaitu Provinsi Papua dengan 27,43 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah DKI Jakarta dan Banten (Gambar 1).

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Maret 2019

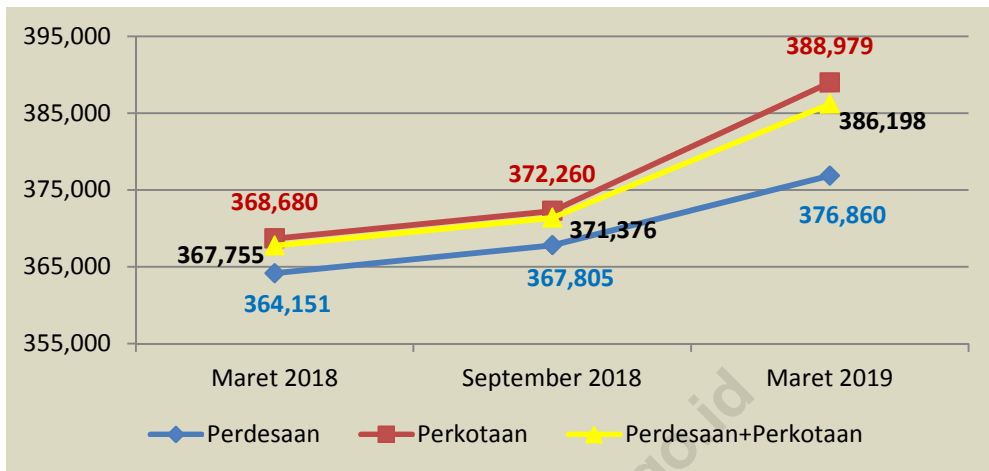


Sumber : Data Susenas Maret 2019

III. Perubahan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu setahun dari Maret 2018 – Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 18.443,- dari Rp. 367.755,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 386.198,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

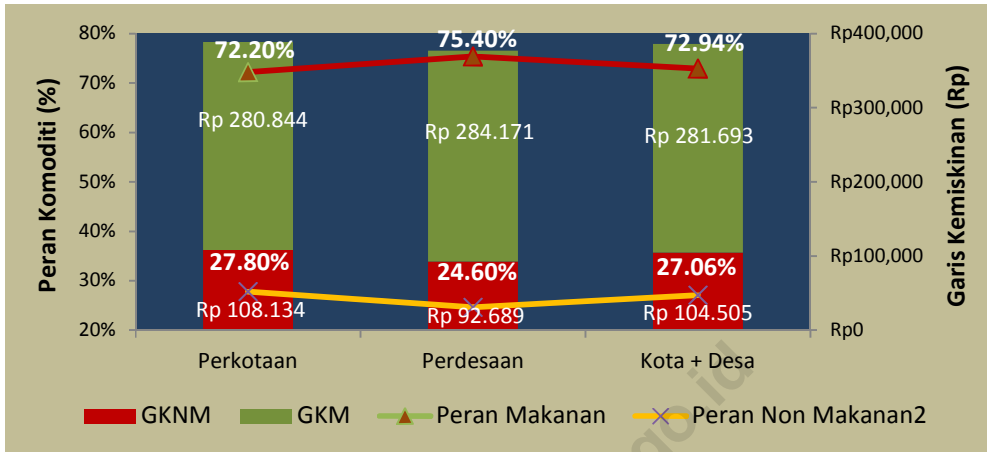
Gambar 2. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Maret 2018-Maret 2019



Sumber : Data Susenas 2018-2019

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, Garis Kemiskinan perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu dari Rp. 368.680,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 388.979,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Sedangkan Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan dari Rp 364.151,- per kapita per bulan di Maret 2018 menjadi Rp. 376.860,- per kapita per bulan pada Maret 2019 (Gambar 2).

Gambar 3. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan/Non Makanan Provinsi Jawa Barat, Maret 2019



Sumber: Data Susenas Maret 2019

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada Maret 2019, secara total Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 281.693,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp 104.505,- per kapita per bulan. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan yaitu Rp. 284.171,- per kapita per bulan dibanding Rp 280.844,- per kapita per bulan. Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu mencapai 108.134,- per kapita per bulan di perkotaan sedangkan di perdesaan mencapai Rp. 92.689,- per kapita per bulan (Gambar 3).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sangat dominan dibandingkan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan

makanan. Pada bulan Maret 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan sebesar 72,20 persen di perkotaan dan 75,40 di perdesaan. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK sebesar 72,94 persen.

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, Bank Dunia menghitung Garis Kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversikan ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli), bukan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP ini menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$ 1 di Amerika. Untuk negara *lower middle income* Bank Dunia menetapkan dua batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 US\$ PPP per kapita per hari sebagai batas *extreme poverty* dan 3,20 US\$ PPP per kapita per hari sebagai batas *poverty*. Sebagai contoh misalnya pada kondisi Maret 2019 posisi Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 425.250,- per kapita per bulan, hal tersebut setara dengan 2,59 US\$ PPP/hari.

Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Maret 2019

Komoditi	Perkotaan (%)	Komoditi	Perdesaan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	72,20	Makanan	75,40
Beras	23,18	Beras	29,68
Rokok kretek filter	12,58	Rokok kretek filter	10,10
Telur ayam ras	4,96	Telur ayam ras	4,94
Daging ayam ras	4,91	Daging ayam ras	3,65
Kopi bubuk & instan	3,14	Kopi bubuk & instan	3,09
Bukan Makanan	27,80	Bukan Makanan	24,60
Perumahan	8,78	Perumahan	8,90
Bensin	4,37	Bensin	2,92
Listrik	3,44	Listrik	2,12
Pendidikan	1,67	Pendidikan	1,14
Perlengkapan mandi	1,19	Perlengkapan mandi	1,09

Sumber : Data Susenas 2019

Jika dilihat pada komoditi yang menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada Maret 2019 baik itu di daerah perkotaan maupun di perdesaan, beras menjadi komoditi dengan urutan pertama. Di perkotaan, beras mencapai angka 23,18 persen sedang di perdesaan bisa mencapai 29,68 persen. Hal ini dikarenakan makanan utama dari sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah beras, sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebenarnya kalau dilihat makanan yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek ini banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 12,58 persen untuk daerah perkotaan dan 10,10 persen di perdesaan.

Selanjutnya komoditi urutan ketiga sampai kelima sebagai penyumbang terbesar untuk Garis Kemiskinan di perkotaan adalah telur ayam ras, daging ayam ras, dan kopi bubuk dan instan yaitu secara berturut-turut sebesar 4,96 persen, 4,91 persen dan 3,14 persen. Sedangkan di perdesaan urutan ketiga sampai kelima komoditi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan adalah telur ayam ras, daging ayam ras dan kopi bubuk dan instan secara berturut-turut sebesar 4,94 persen, 3,65 persen, dan 3,09 persen.

Untuk komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 8,78 persen, bensin 4,37 persen, listrik 3,44 persen, pendidikan 1,67 persen dan perlengkapan mandi sebesar 1,19 persen. Sedangkan lima komoditi bukan makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan

di daerah pedesaan secara berturut-turut adalah perumahan yaitu sebesar 8,90 persen, bensin sebesar 2,92 persen, listrik sebesar 2,12 persen, pendidikan sebesar 1,14 persen dan perlengkapan mandi sebesar 1,09 persen.

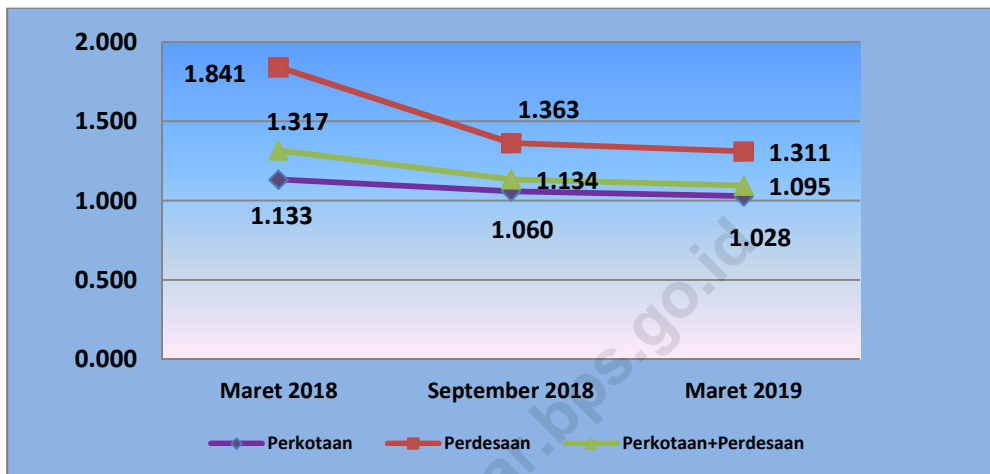
IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

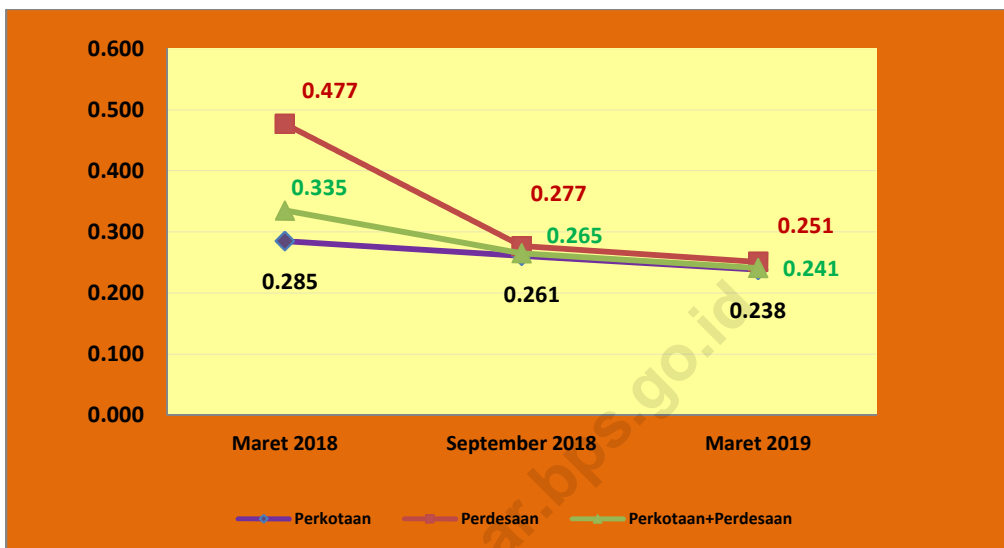
Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat Maret 2018-Maret 2019



Sumber : Data Susenas 2018-2019

Pada periode Maret 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,317 pada keadaan Maret 2018 menjadi 1,095 pada keadaan Maret 2019. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Jika dilihat menurut wilayah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan baik di perkotaan maupun perdesaan. Untuk wilayah perdesaan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 1,841 pada bulan Maret 2018 menjadi 1,311 pada bulan Maret 2019. Sedangkan di wilayah perkotaan turun dari 1,133 pada Maret 2018 menjadi 1,028 pada Maret 2019 (Gambar 4). Apabila dilihat secara keseluruhan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan. Ini bisa menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik daripada di perdesaan.

Gambar 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019



Sumber : Data Susenas 2018-2019

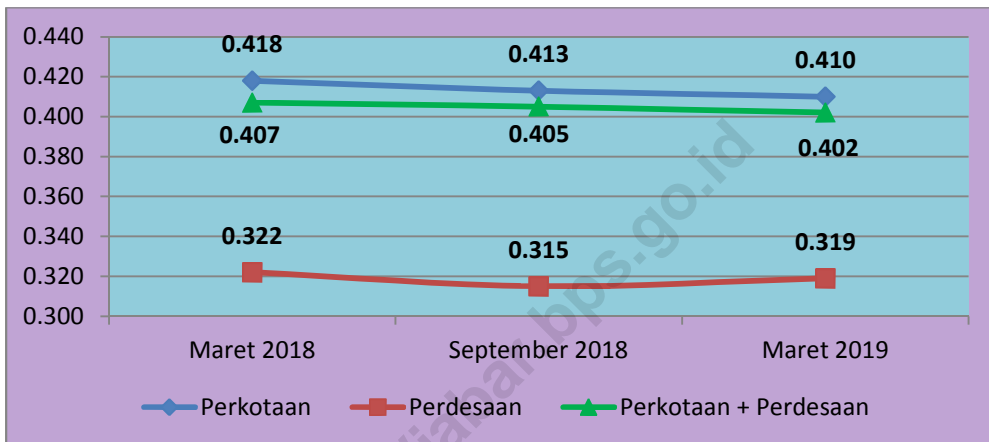
Dari hasil Susenas Maret 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,241. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,024 poin dibandingkan pada September 2018 (0,265). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Pada kurun waktu yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan turun dari 0,261 menjadi 0,238. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan, turun dari 0,277 menjadi 0,251 (Gambar 5).

V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Maret 2018 – Maret 2019

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan penduduk. Karena data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan

pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* maka semakin tinggi pula ketimpangannya.

Gambar 6. Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2018 – Maret 2019



Sumber : Data Susenas 2018-2019

Secara umum perkembangan nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat periode Maret 2018 - Maret 2019 mengalami penurunan, ini merupakan hal yang baik. Dengan semakin menurunnya nilai *Gini Ratio* ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Barat semakin berkurang. Pada Maret 2018, nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Barat sebesar 0,407 dan turun pada September 2018 menjadi 0,405. Pada bulan Maret 2019, nilai *Gini Ratio* mengalami penurunan dibandingkan September 2018 yaitu menjadi sebesar 0,402.

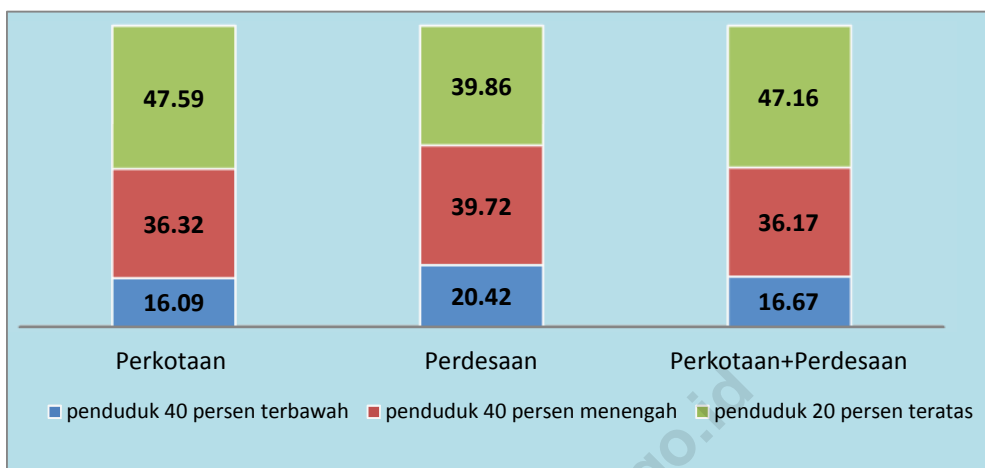
Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, dalam kurun waktu Maret 2018 – Maret 2019, daerah perkotaan angka *Gini Ratio* memiliki pola yang sama dengan *Gini Ratio* total yaitu dari 0,418 pada bulan Maret 2018 turun ke 0,413 di September 2018 kemudian turun lagi menjadi 0,410 pada Maret 2019. Pada Maret 2018, nilai *Gini Ratio* di perdesaan sebesar 0,322 turun

menjadi 0,315 pada September 2018 dan kemudian naik menjadi 0,319 pada bulan Maret 2019. Melihat fenomena tersebut, perlu dikaji lebih lanjut, mengapa terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan di perdesaan. Secara teori, peningkatan investasi di suatu daerah tidak serta merta menurunkan tingkat kesenjangan, pada jangka waktu pendek biasanya akan meningkatkan kesenjangan. Hal ini disebabkan yang menikmati keuntungan dari investasi tersebut pada awalnya adalah pemilik modal. Secara bertahap, baru investasi tersebut dapat mengurangi kesenjangan. Apabila hal ini dianalogkan dengan pemberian alokasi dana desa khususnya untuk bantuan modal, diduga bantuan tersebut baru dinikmati oleh pemilik usaha belum berdampak pada seluruh masyarakat desa.

Selain menggunakan *Gini Ratio*, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen,
2. Ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen
3. Ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Gambar 7. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, Maret 2019 (Persen)



Sumber : Data Susenas Maret 2019

Pada Maret 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat adalah sebesar 16,67 persen yang berarti Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan sedang bahkan hampir mendekati kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2019 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 16,37 persen.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun menyimpulkan hal yang sama yaitu ketimpangan daerah perkotaan di Jawa Barat ada pada kategori sedang dan yang di perdesaan ada pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada Maret 2019 adalah 16,09 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2019 adalah sebesar 20,42 persen.

VI. Penutup

Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat sebesar 3,40 juta jiwa (6,91 persen). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persen jika dibandingkan keadaan bulan September 2018 dan menurun 0,54 poin persen jika dibandingkan Maret 2018.

Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 386.198,- per kapita per bulan. Ini mengalami peningkatan sebesar 3,99 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 dan meningkat 5,01 persen jika dibandingkan kondisi Maret 2018. Pada Maret 2019, peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih mendominasi dibandingkan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan sebesar 72,94 persen.

Pada periode Maret 2018 - Maret 2019, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Keparahan kemiskinan (P2) di Jawa Barat sama-sama menunjukkan tren menurun. Pada Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jawa Barat mencapai angka 1,095. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2018 yaitu 1,317. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2019 cenderung mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode Maret 2019 mencapai nilai 0,241 dan mengalami penurunan dibandingkan kondisi Maret 2018 yaitu 0,335. Penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2019 ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Jawa Barat cenderung menyempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2019. Berita Resmi Statistik No. 38/07/32/Th.XXI, 15 Juli 2019, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
- Badan Pusat Statistik, 2019. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat, September 2018, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
- Badan Pusat Statistik, 2018. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018, Jakarta: Badan Pusat Statistik

<https://jabar.bps.go.id>

<https://jabar.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS

1. Literatur Kemiskinan

- ❖ Secara asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
 - **Kemiskinan kultural** adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.
 - **Kemiskinan struktural** adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".
- ❖ Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian **kemiskinan relatif** merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian **kemiskinan secara absolut** merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan.

Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

- ❖ Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran **kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.**
- ❖ Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum.

1.1. Terminologi Kemiskinan Lainnya

- ❖ Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal

indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

- ❖ Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.
- ❖ Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai, “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.
- ❖ United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan.
- ❖ Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar

tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

2. Metode Penghitungan kemiskinan

2.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan. Untuk penimbang data Susenas (weight) yang digunakan mulai tahun 2011 merupakan backcasting dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010.

2.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) secara matematis:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

2.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan

aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}'$$

GKM^*_{jp} : Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilo kalori) provinsi p

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya untuk memperoleh GKM tersebut dilakukan penyetaraan harga 2100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sebagai berikut:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

\overline{HK}_{jp} : Harga rata – rata kalori di daerah j di provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM : Kebutuhan minimum makanan di daerah *j*, yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

j : Daerah (perkotaan/perdesaan)

p : Provinsi *p*

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{jkp} \cdot V_{jkp}$$

GKNM_{jp} : Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah *j* dan provinsi *p*

V_{jkp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah *j* dan provinsi *p*

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan *k* menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah *j*

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$: % Penduduk miskin di provinsi p

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p : Jumlah penduduk provinsi p

2.5. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α : 0, 1, 2

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk.

Jika $\alpha=0$, diperoleh Head Count Index (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index- P_2).

3.1. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - x_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

G : Koefisien Gini (Gini Ratio)

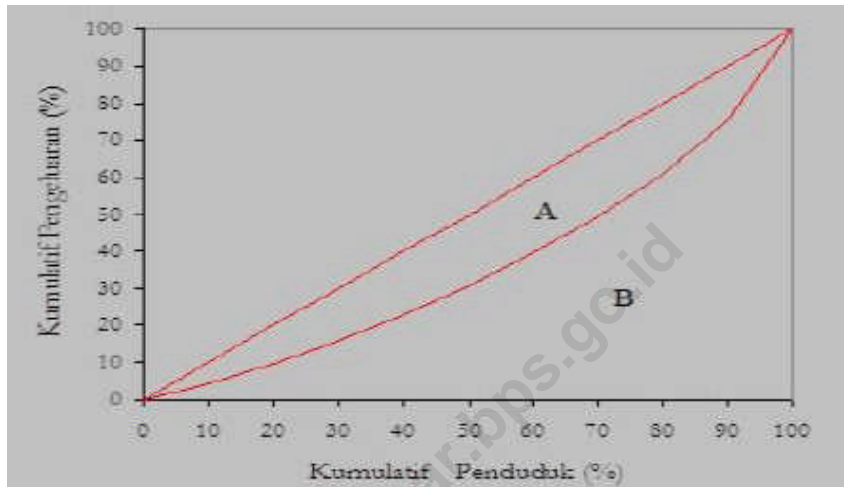
X_k : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2... n$ dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$

Y_k : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2... n$ dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna

pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Gambar 1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorentz



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz (Gambar 6.1), yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

1. Dapat didekomposisi
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari subkelompok masyarakat (sub-grup).
2. Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.2. Ketimpangan berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
3. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. PHH Mustofa No.43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp: 022 7272595, 7201696 Fax: 022 7213572
Email: bps3200@bps.go.id
Website: <http://jabar.bps.go.id>

ISSN 2654-6841

